

**EVALUASI KEBIJAKAN CETAK SAWAH
STUDI KASUS: DESA SUNGAI BESAR KABUPATEN LINGGA**

Rizki Juliandi¹, Rumzi Samin², Edy Akhyary³

Juliandirizki053@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Abstract

This Rice Paddy Print Policy aims to make Lingga Regency a rice barn in 2020 and prosper the people of Lingga Regency in particular. In the process of implementing the Rice Paddy Print Policy, there are still many obstacles, both infrastructure (irrigation), Human Resources (HR), and Natural Resources (SDA). Therefore, this policy still needs to be reconsidered in the future. The purpose of this study was to evaluate the existing paddy field printing policies in Sungai Besar Village, Lingga Regency. This type of research is descriptive with a qualitative approach and using a positive sampling method. In evaluating this paddy print program, researchers used Dunn's (2003: 216) theory which has 6 dimensions consisting of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy. The results of this study are judged from the dimension of effectiveness, not very effective because they are still constrained by community interest, soil pH and the unavailability of irrigation channels. Meanwhile, from the efficiency dimension, it is very sufficient and answers problems that occur in the field. Judging from the dimension of sufficiency it is still far from sufficient, because the yields are far from the target, in terms of equity, it is still not equitable or fair, because many people are not involved in running the program and also not all regions have Candidate Farmers who are Prospective Land. (CPCL). From the responsiveness dimension, the longer the community's response has decreased due to the fact that rice yields are not optimal. From the dimension of accuracy, this program has not been on target and must be reviewed. The conclusion is that running the paddy field printing program in Sungai Besar Village, Lingga Regency, has not run optimally because it is still constrained by irrigation channels, Natural Resources (SDA), and Human Resources (SDM).

Keywords: Evaluation, Policy, Print Rice Fields in Sungai Besar Village.

I. Pendahuluan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Kebijakan cetak sawah ini sudah ada sejak zaman kesultanan Riau Lingga Johor-Pahang. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II (1890), tapi program ini tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, padi dianggap mitos oleh masyarakat setempat. Kemudian kebijakan tersebut digantikan dengan sagu. Hingga sekarang terdapat bukti-bukti peninggalan sejarah pabrik pengelolaan sagu dan juga beberapa Desa yang masih aktif dalam pengelolaan sagu. secara topografi, Kabupaten Lingga memiliki lahan sagu seluas 2.700 Ha, lahan seluas itu tersebar di dua belas desa dengan jumlah tempat pengelolaan pabrik sagu sekitar 140 unit.

Kemudian, pada tahun 2016 sejak terpilihnya Bupati yang baru, pemerintah ingin menjadikan Lingga sebagai daerah penghasil padi terbesar di Kepri tahun 2020. Menurut Thomas R. Dye dalam Anggara (2014:35), “kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”.

Kebijakan cetak sawah ini sudah mulai berjalan sejak pertengahan tahun 2016 lalu, dengan melakukan pembukaan lahan yang berada di beberapa Desa di Kabupaten Lingga, adapun Desa-Desanya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pembukaan Lahan

No.	Nama Desa	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)
1.	Sungai Besar	Lingga utara	732
2.	Bukit Langkap	Lingga utara	395
3.	Resang	Singkep Selatan	254
4.	Maruk Kecil	Singkep Selatan	478
5.	Panggak Laut	Lingga	154
6.	Nerekeh	Lingga	91
7.	Panggak Darat	Lingga	136
Total keseluruhan			2.240 Hektare

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga 2020.

Pada tahun 2018 tepatnya pada 15 februari, Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga akan melakukan gerakan Penanaman Serentak diatas lahan yang baru selesai lebih Kurang 1.800 Ha. Yang terdiri dari 600 Ha lahan sawah baru dan 1.200 Ha lahan pertanian jagung. Penanaman serentak ini banyak melibatkan ribuan massa yang terdiri dari kelompok tani, mahasiswa, TNI/POLRI, Organisasi Kepemudaan dan ORMAS, termasuk Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) lingga.

Adapun peserta yang terlibat dalam gerakan penanaman serentak:

Tabel 2.2 Yang terlibat pada penanaman Serentak 2018

No.	Yang Terlibat	Jumlah
1.	Mahasiswa Malang	200 Orang
2.	Dosen	52 Orang
3.	Mahasiswa Medan	25 Orang
4.	TNI/POLRI	350 Orang
5.	Ormas dan Organisasi Kepemudaan	1.157 Orang
6.	HKTI	262 Orang
Total		2.046 Orang

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga 2020

Pembukaan lahan yang di lakukan Pemerintah Daerah ini menggunakan alat yang di peroleh dari bantuan kementerian kehutanan (MENTAN), yaitu berupa 12 unit traktor roda 4, 5 unit traktor roda 2, 15 unit pompa air dan unit jajar legowo, selain itu MENTAN juga memberi bantuan benih

dan bibit padi dan jagung. Dana awal yang digunakan pemerintah Daerah untuk membuka lahan ini, adalah dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan Kementerian Pertanian.

Pemerintah Kabupaten Lingga ingin menjadikan Lingga sebagai penghasil padi di Kepri pada tahun 2020. Melihat kondisi Lingga yang sangat strategis yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, maka dari itu selain untuk menghasilkan padi untuk pasokan kebutuhan daerah sendiri, pemerintah Kabupaten Lingga ingin menjual padi tersebut ke negara-negara tetangga. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Lingga sangat antusias ingin menjadikan Lingga sebagai Daerah penghasil padi terbesar di Kepri, tanpa melakukan pertimbangan tertentu seperti Sumber Daya Manusia yang kurang mendukung, kondisi tanah yang kurang memadai, dan saluran irigasi yang tidak memadai. Hingga saat ini hasil yang di peroleh dari panen padi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan petaninya saja.

Bentuk kemandirian lahan pertanian terlebih dahulu harus diverifikasi masalah irigasinya, sebab irigasi merupakan usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Sebagaimana yang dikatakan Sudjarwadi (Saroso, Dkk 2007:55), “pembangunan saluran irigasi untuk menunjang bahan pangan nasional sangat diperlukan, sehingga ketersediaan air dilahan akan terpenuhi walaupun lahan tersebut berada jauh dari sumber air permukaan (sungai). Hal tersebut tidak terlepas dari usaha teknik irigasi yaitu memberikan air dengan kondisi tepat mutu, tepat ruang, dan tepat waktu dengan cara yang efektif dan ekonomis”. Sesuai dengan peraturan Menteri PUPR Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, yaitu daerah irigasi yang ditetapkan dalam peraturan menteri ini berupa daerah irigasi yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota yang jenisnya meliputi: Irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, irigasi tambak. Sedangkan di Kabupaten Lingga menggunakan irigasi skunder.

Friedrick dalam Winarno (2012:20) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Dalam bentuknya yang positif, keputusan kebijakan dapat berupa penetapan undang-undang atau dikeluarkannya perintah-perintah eksekutif. Sebagaimana Anggara mengutip pendapat Dunn (2014:5), ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Saling bergantung. Kebijakan bukan merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah
2. Subjektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, dijelaskan, dan di evaluasi secara selektif.
3. Sifat buatan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.
4. Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya dan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Dari segi bahasa evaluasi berasal dari bahasa Inggris “*evaluasian*” yang di serap dalam perbandaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan memepertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “*evaluasi*” yang dapat di artikan memberikan dengan membandingkan suatu hal dengan satuan tertentu. Menurut Arikunto (2010:2), “*evaluasi* adalah kegiatan untuk mengumuplkan suatu informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan”. Sedangkan Sucherman dalam Arikunto (2010:1) “*memandang evaluasi sebagai sebuah*

proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diperoleh rumusan masalah yaitu Bagaimana Evaluasi Kebijakan Cetak Sawah di Kabupaten Lingga dan tujuan dari penelitian ini adalah Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk “Mengevaluasi Kebijakan Cetak Sawah di Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga.

II. Metode Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan ataupun tulisan dari informan yang diteliti. Peneliti dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian ini yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan cetak sawah studi kasus desa sungai besar kabupaten lingga. Ada tiga teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi (Soehartono 2008: 67-68). Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman dalam Gunawan (2014:210), mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut: reduksi, paparan data, dan penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Cetak Sawah Studi Kasus Desa Sungai Besar Kabupaaten Lingga. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

1. Agus Ikhwanto, Dkk. (2019). Dengan judul peneitian Evaluasi Program Cetak Sawah Oleh Korem 174/ATW di Marauke dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Dalam penelitian ini, Agus Ikhwanto, Dkk lebih memfokuskan penelitiannya pada menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan program cetak sawah oleh korem 174/ATW di Marauke yang hasilnya diharapkan menjadi sebuah masukan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan cetak sawah di masa yang akan datang. Ada pun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang memiliki manfaat sumbangan untuk penentuan kebijakan.
2. Silvia Nora, Dkk. (2015). Dengan judul penelitian Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Lahan Sawah di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik tingkat kesesuaian lahan sawah dan lahan kering di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Untuk menganalisis usaha-usaha perbaikan yang perlu di lakukan dalam meningkatkan produktivitas tanaman dan untuk membuat peta kesesuaian lahan aktual dan kesesuaian lahan potensial tanaman padi sawah dan beberapa tanaman padi kering di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli.
3. DesyAnggar Sary (2015). Dengan judul penelitian Evaluasi Program Pemberdayaan Petani Malalui teknologi dan Informasi Pertanian Usaha Ternak Domba. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan program, kendala yang di hadapi, solusi program,

strategi program pemberdayaan petani melalui teknologi dan informasi pertanian pada usaha ternak domba di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya yaitu adanya kekhasan kajian ini dibandingkan dengan referensi terdahulu objek penelitian yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Lingga dengan fokus pada Evaluasi Kebijakan Cetak Sawah. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori oleh William N. Dunn, dengan kriteria-kriteria evaluasi yaitu : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Dan juga terdapat perbedaan terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan.

Evaluasi Kebijakan Cetak Sawah Studi Kasus Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga.

Penelitian yang dilakukan yaitu tentang evaluasi kebijakan cetak sawah studi kasus desa sungai Besar Kabupaten Lingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan cetak sawah yang ada di Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga, dan melihat apa saja kendala yang terjadi dilapangan dalam penerapan kebijakan cetak sawah ini. komponen- komponen yang harus diperhatikan dalam menjalankan kebijakan cetak sawah ini, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan Fasilitas pendukung lainnya seperti irigasi. Karena irigasi sangat berpengaruh dalam menumbuh kembangkan padi sebagai saluran air menuju tanggul persawahan. Jumlah informan sebanyak 8 orang yang terdiri dari 1 Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga, 1 Kepala Bidang Pertanian, 1 Kepala Desa Sungai Besar dan 5 Orang Kelompok Tani yang terlibat dalam Kebijakan cetak sawah. Dalam mengevaluasi kebijakan cetak sawah ini, peneliti menggunakan teori William N. Dunn yaitu evaluasi Kebijakan yang memiliki 6 dimensi yang terdiri dari Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Responsivitas, Perataan, dan Ketepatan.

1. Efektivitas

Dalam Kebijakan cetak sawah ini merupakan perbandingan terbaik antara input dan output, yang lebih ditekankan pada output. Artinya evaluasi Kebijakan yang di buat terhadap cetak sawah yang sudah berjalan sebagaimana semestinya. Efektivitas yang baik harus memenuhi beberapa kriteria misalnya dalam cetak sawah ini harus di dukung dengan irigasi yang memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung, bibit yang berkualitas dan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan cetak sawah ini belum berjalan dengan efektif. Karena masih banyak terdapat kekurangan. Selain dari kurangnya minat masyarakat, hasil yang diperoleh dari kebijakan ini pun belum bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Berdasarkan daftar ceklis yang peneliti gunakan dalam program cetak sawah di Desa Sungai Besar ini tidak tersedianya saluran irigasi, padahal salah satu faktor pendukung keberhasilan dari bertanam padi ialah saluran irigasinya. Karena tanpa saluran irigasi air sulit untuk menjangkau area persawahan.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara input dan output yang lebih ditekankan pada output. Artinya Kebijakan cetak sawah yang di jalankan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Lingga mencapai hasil yang di harapkan. Efisiensi bisa di tentukan dari perhitungan biaya perunit produk atau layanan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan efisiensi dari kebijakan cetak sawah ini menghasilkan hasil yang baik dengan kualitas beras yang bagus. Berdasarkan daftar ceklis yang peneliti gunakan dalam melakukan observasi, dalam kebijakan cetak sawah ini pemerintah telah menyediakan bibit walaupun bibit yang disediakan pemerintah tidak bisa digunakan sepenuhnya. Tapi supaya hasil yang diharapkan sesuai dengan target, diperlukan usaha yang lebih keras lagi.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan cetak sawah yang di laksanakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Lingga di rasakan mencukupi kebutuhan masyarakat dan atau lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kecukupan masih terkendala dengan hasil panen yang kurang memadai dan jauh dari kata cukup, sedangkan dari fasilitas atau alat yang di sediakan pemerintah mu;ai dari alat berat berat seperti cobelco, mesin traktor dan mesin giling padi sudah sangat mencukupi. Berdasarkan daftar ceklis yang peneliti gunakan, untuk hasil panen sudah ada. Tetapi masih belum atau jauh dari kata cukup. Sedangkan untuk fasilitas yang disediakan sudah sangat mencukupi untuk menjalankan kebijakan cetak sawah hingga panen.

4. Pemerataan

Pemerataan secara menyeluruh dengan kriteria kesamaan keadilan tanpa pilih lokasi percontakan sawah, dari kebijakan atau kebijakan cetak sawah yang di laksanakan pemerintah Daerah Kabupaten Lingga apakah sudah rasional atau masuk akal karena pemerataan berkaitan dengan keadilan yang artinya bisa bermanfaat untuk semuanya.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa pemerataan dari kebijakan cetak sawah ini belum sepenuhnya merata. Masih banyak masyarakat yang tidak ikut terlibat dalam proses pelaksanaannya, hanya masyarakat yang memiliki lahan saja dan juga tidak semua Desa juga memiliki (Calon Petani Calon Lahan) CPCL. Masyarakat lebih senang bekerja yang dalam kesehariannya dilakukan, Itulah yang sulit untuk dirubah oleh pemerintah.

5. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan cepat tanggap terhadap keluhan masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik terhadap kebijakan cetak sawah. Karena jika responsivitas baik, maka tidak menutup kemungkinan bisa mendapatkan hasil sesuai yang di harapkan.

Dari hasil wawancara dari beberapa informan diatas, masyarakat merespon dengan baik walaupun tidak sepenuhnya. Sesuai dengan daftar ceklis yang peneliti gunakan dalam melakukan observasi, untuk respon masyarakat menurun karena hasil yang diperoleh dari kebijakan cetak sawah ini tidak sesuai yang diharapkan. Sedangkan pemerintah selalu cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dilapangan. Cuma yang masih menjadi kendala dalam kebijakan ini adalah tidak tersedianya saluran irigasi, masyarakat banyak mengeluhkan saluran irigasi yang tidak memadai.

6. Ketepatan

Ketepatan kebijakan cetak sawah, bisa dinilai tepat atau perlu dilakukan pertimbangan tertentu. Karena suatu kebijakan juga harus sesuai dengan keadaan masyarakat Kabupaten Lingga.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat dikatakan bahwa untuk ketepatan dari Kebijakan cetak sawah ini tidak tepat sasaran. Banyak kendala yang terjadi untuk penerapan kebijakan cetak sawah ini. sesuai dengan daftar ceklis yang peneliti gunakan, lahan dan tanah sudah tersedia. Tetapi terdapat kendala di Ph tanah yang tinggi dengan zat asam juga dipengaruhi dengan faktor sumber daya manusia (SDM) yang kurang berminat dan tidak mempunyai skil dibidang pertanian. Belum lagi kendala yang sama yaitu tidak tersedianya saluran irigasi yang memadai. Sedangkan saluran irigasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam menumbuh kembangkan padi. Tanpa saluran irigasi, air akan sulit menjangkau ke tanggul sawah. Jika terjadi hujan air akan masuk ke tanggul sawah dan menyebabkan kebanjiran, tapi apabila musim kemarau air akan sulit didapat.

IV. Kesimpulan

Kesimpulannya bahwa Evaluasi Kebijakan Cetak Sawah di Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga yang dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan belum berlangsung dengan maksimal. Karena selama empat tahun berjalannya program tersebut, tidak tersedianya saluran irigasi dan hasil yang diperoleh belum optimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

1. Dari dimensi efektivitas, pencapaian efektivitas dari kebijakan cetak sawah ini belum bisa dikatakan berhasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat dikatakan bahwa kebijakan cetak sawah ini belum berjalan dengan efektif. Karena masih banyak terdapat kekurangan. Selain dari kurangnya minat masyarakat, hasil yang diperoleh dari kebijakan ini pun belum bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
2. Dari dimensi efisiensi, Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan efisiensi dari kebijakan cetak sawah ini menghasilkan hasil yang baik dengan kualitas beras yang bagus. Berdasarkan daftar ceklis yang peneliti gunakan dalam melakukan observasi, dalam kebijakan cetak sawah ini pemerintah telah menyediakan bibit walaupun bibit yang disediakan pemerintah tidak bisa digunakan sepenuhnya. Tapi supaya hasil yang diharapkan sesuai dengan target, diperlukan usaha yang lebih keras lagi.
3. Dimensi kecukupan, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, untuk tingkat kecukupan masih jauh dari kata cukup. Karena masih terkendala dengan hasil panen yang rendah. Sedangkan untuk fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sudah sangat mencukupi mulai dari alat untuk membajak hingga tempat penggilingan beras saat panen.
4. Dimensi pemerataan, kalau dilihat dari dimensi pemerataan yang berkaitan dengan keadilan. Untuk kebijakan cetak sawah ini belum sepenuhnya merata Berdasarkan wawancara, dapat dikatakan bahwa pemerataan dari kebijakan cetak sawah ini belum sepenuhnya merata. Masih banyak masyarakat yang tidak ikut terlibat dalam proses pelaksanaannya, tidak semua Desa juga memiliki (Calon Petani Calon Lahan) CPCL. Masyarakat lebih senang bekerja yang dalam kesehariannya dilakukan, Itulah yang sulit untuk dirubah oleh pemerintah. Ditambah lagi dengan rendahnya hasil produksi yang jauh dari kata cukup sampai-sampai masyarakat yang bertempat tinggal di Desa itupun tidak bisa merasakan hasilnya.
5. Dimensi responsivitas, Dari hasil wawancara dari beberapa informan, masyarakat merespon dengan baik walaupun tidak sepenuhnya. Respon masyarakat menurun karena hasil yang diperoleh dari kebijakan cetak sawah ini tidak sesuai yang diharapkan. Sedangkan pemerintah selalu cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dilapangan. Cuma yang masih menjadi kendala dalam kebijakan ini adalah tidak tersedianya saluran irigasi, masyarakat banyak mengeluhkan saluran irigasi yang tidak memadai.
6. Dimensi ketepatan, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai dimensi ketepatan, untuk program cetak sawah ini harus dilakukan pertimbangan lagi. Mengingat masih banyak kendala yang tidak sesuai, baik dari faktor SDA, SDM, pola pikir dan budaya masyarakat serta masih terkendala dengan infrastruktur yaitu irigasinya.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi dan Suharsimi Abdul Jabar, Cepi. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Jurnal

- Agus Ikwnto, Dkk. 2019. *Evaluasi Program Cetak Sawah Oleh Korem 174/ATW di Marauke Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional*. Jurnal Strategi Perang Semesta.
- Desi Anggar Sari. 2015. *Evaluasi Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian Usaha Ternak Domba*. Jurnal Universitas Negeri Semarang.
- Silvia Nora, Dkk. 2015. *Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Lahan sawah di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli*. Jurnal Pertaian Tropik.

Website

- <https://www.batamnews.co.id/berita-51484-panen-padi-perdana-di-desa-lanjut-kades-yakin-program-pertanian-awenizar-berhasil.html> (di akses pada 08 Oktober 2019. Pukul 01.00)
- <https://www.batamtimes.co/2019/12/09/sawah-di-kabupaten-lingga-tergenang-air-akibat-limpahan-air-irigasi/> (Di akses pada 10 Oktober 2019. Pukul 08.50)
- <https://pijarkepri.com/2018/07/desa-lanjut-buka-81-hektare-lahan-sawah>(Di akses pada 05 Oktober 2019. Pukul 17:20)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lingga (Di akses pada 05 Oktober 2019. Pukul 21:45)
- <https://regional.kompas.com/read/2016/12/31/09441931/pejabat.kabupaten.ini.dilantik.di.sawah.dan.kuburan?page> (Di akses pada 15 November 2019. Pukul 15:30).

VI. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si selaku Penasehat Akademik dan juga sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan, ilmu, pengajaran, masukan-masukan dan coretan-coretan membangun di lembar revisi skripsi saya.
2. Bapak Dr. Edy Akhyary, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing, memberi masukan dan saran kepada penulis dalam lembar skripsi saya.
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga serta Bapak/Ibu masyarakat Desa Sungai Besar yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.